

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap bangsa mempunyai tujuan yang harus dicapai yaitu memajukan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional suatu negara dapat dilayani baik di dalam maupun di luar perbatasannya. Anda harus menggunakan mekanisme unik, terutama instrumen kebijakan luar negeri, untuk memajukan kepentingan nasional di luar negeri.

Kebijakan ekonomi AS dengan Indonesia di bawah pemerintahan Biden masih belum sepenuhnya jelas karena merupakan kebijakan yang relatif baru. Namun, pemerintah AS telah mengumumkan sejumlah sumbu kebijakan, dan sejumlah kebijakan lain kini sedang dipertimbangkan bersama Indonesia. Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan cermin dari keadaannya internalnya, yang dipengaruhi oleh perubahan yang cepat di lingkungan lokal dan global. Selain itu, terlihat pula bagaimana kebijakan luar negeri AS diterapkan dalam menghadapi negara lain guna memajukan kepentingan bangsanya.

Status negara adidaya mengacu pada kedudukan suatu bangsa dalam komunitas internasional sebagai sesuatu yang dominan dan tidak terbantahkan. Amerika Serikat telah mengklaim status ini sejak berakhirnya perang dingin. Istilah "hegemon global" mengacu pada negara adidaya, yang dapat dilihat sebagai bangsa dengan kemampuan untuk mendominasi seluruh dunia, bukan hanya satu atau lebih di wilayah tertentu. (Miller, 2006)

Evolusi politik dan sistem pemerintahan Amerika Serikat dapat ditelusuri kembali ke era kolonial Inggris abad ke-17. Gagasan politik tentang kebebasan lahir di mana ada tekanan politik dari kerajaan Inggris. karena perlakuan Kerajaan Inggris terhadap rakyat Amerika, yang tidak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan keinginan mereka. Selain itu, ideologi Amerika dibangun di atas gagasan kebebasan dan hak. Kerajaan Inggris juga tidak menyukai ide ini, tetapi akhirnya mendapat daya tarik di negara lain sebelum berakar di Amerika. (Cipto, 2003)

Pada tanggal 4 Juli 1776, 13 Negara Bagian Amerika yang asli mendeklarasikan kemerdekaannya dari koloni Inggris. Republik Amerika telah menjadi koloni Inggris selama lebih dari satu abad ketika memproklamasikan kemerdekaannya. Pengalaman kolonial menjadikan budaya Eropa sebagai kekuatan dominan dalam perluasan dan perkembangan peradaban Amerika di masa depan. Setelah satu tahun, mereka memutuskan untuk menulis "Artikel Konfederasi". Pasal ini secara resmi ditandatangani pada tahun 1778, namun baru pada bulan Maret 1781 Negara Bagian Mariland ke-13 menegaskannya bahwa pasal tersebut dapat dianggap sah dan wajib. Landasan perjanjian ini dibangun kembali sepenuhnya dan disetujui pada tahun 1778 sebagai hasil dari berbagai tujuan. 1789. Kekuasaan pemerintah federal dalam konstitusi ini berbeda dengan "Article of Confideration". (Cipto, 2003)

Tren kebijakan luar negeri AS berasal dari revolusi non-intervensi Amerika sekitar Perang Dunia I dan berkembang pesat di seluruh dunia hingga Perang Dunia II dan akhir Perang Dingin. (Herring, 2009) Sejak abad ke-19, kebijakan luar negeri AS ditandai dengan pergeseran dari ideologi realis ke ideologi idealis dan

ideologi hubungan internasional Wilsonia. Kebijakan luar negeri pertama dirumuskan oleh presiden pertama Amerika Serikat, George Washington. Tentang bagaimana politik luar negeri ini memberikan ketaatan pada itikad baik dan keadilan terhadap semua bangsa dan terciptanya perdamaian dan harmoni dengan semua bangsa dan menganjurkan perdagangan bebas dengan negara lain. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dibentuk dalam konteks partai presidensial. Ada 2 partai politik di Amerika Serikat, Partai Demokrat dan Partai Republik. Partai Demokrat menekankan kebijakan luar negerinya melalui soft diplomacy atau juga soft politics yang tidak jarang menyangkut keamanan tradisional. Berbeda dengan Partai Republik yang terbilang lebih keras dan lebih menonjolkan Kebijakan Luar Negerinya terhadap Hard Politics dan Keamanan Tradisional. Seiring waktu, masing-masing Presiden memiliki doktrin atau kebijakan yang berbeda-beda, sehingga terkadang kebijakan tersebut diberi nama sesuai dengan doktrin presiden. Pada abad ke-21, pengaruh AS tetap penting, namun telah menurun karena munculnya kekuatan baru seperti China, India, Rusia, dan Uni Eropa. Isu-isu besar terorisme seperti isu iklim dan pengembangan energi nuklir masih ada. (Gvosdev, 2008)

Presiden Amerika Serikat berikutnya, Joseph Robinette Biden Jr, meninggal dunia pada 20 Januari 2021. Amerika Serikat kembali pada kebijakan luar negeri sebelumnya di bawah arahan Presiden Biden, yaitu pendekatan multilateral yang mengedepankan diplomasi. Dunia memandang strategi ini penting karena Amerika Serikat tampaknya mengalami kemunduran akibat penindasan unilateralisme yang dilakukan Presiden Trump sebelumnya, yang menyebabkan negara tersebut kehilangan kredibilitasnya sebagai partisipan penting dalam urusan internasional.

Selain itu, kebijakan multilateralisme akan menjadi kemungkinan di bawah Presiden Biden untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan lingkungan. Kebijakan ekonomi sering kali melibatkan pilihan-pilihan yang diambil untuk mengatasi permasalahan di bidang ekonomi, seperti sistem perpajakan, suku bunga, dan isu-isu lainnya. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan mayoritas kebijakan ekonomi suatu negara. Untuk menjamin kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut, maka dibentuklah kebijakan-kebijakan ekonomi.

Kebijakan fiskal merupakan arahan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengendalikan seluruh pendapatan dan pengeluaran dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi suatu negara (Rozalinda, 2015). Pemerintah dan DPR menetapkan kebijakan fiskal yang terkait dengan kebijakan barang dan jasa. Dokumen tersebut dapat berupa kebijakan yang berkaitan dengan penghitungan ulang kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Untuk lebih mendorong stabilitas perekonomian, kebijakan fiskal dapat didefinisikan sebagai penyesuaian antara pendapatan dan belanja pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam APBN. (Sudirman, 2011)

Karena perkembangan ekonominya yang kuat, Indonesia kini menjadi pemasok pasar yang potensial bagi Amerika Serikat. Dari segi ekonomi, militer, kebudayaan, dan bidang lainnya, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki hubungan bilateral yang positif. Melalui lobi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat diidentifikasi sebagai salah satu pihak yang mendukung kemerdekaan penuh Indonesia dari Belanda pada tahun 1949. Peluang ini pula menguntungkan Indonesia karena dorongan Amerika Serikat dalam meningkatkan infrastruktur pertahanan militer. Fakta bahwa banyak anggota kabinet Presiden

Biden memiliki latar belakang diplomasi, mengelola kerja sama multilateral, dan menetapkan prioritas arah kebijakan di kawasan Asia menunjukkan banyak hal tentang arah kebijakan luar negeri AS yang menghargai multilateralisme dan diplomasi. Pertumbuhan ekonomi kawasan Asia akhir-akhir ini menjadi sangat pesat. Pada tahun 2030, Tiongkok, Jepang, dan ASEAN diperkirakan akan menjadi pemain ekonomi utama di seluruh dunia.

Dengan penekanan bahwa tidak ada satu bidang pun yang menjadi prioritas utama Pemerintahan Biden, kepentingan pemerintah AS menjadi prioritas utama dalam kebijakannya. Sebaliknya, Biden berkonsentrasi pada perbaikan kondisi dalam negeri dan membangun kembali kolaborasi dengan beberapa organisasi internasional. Perubahan kebijakan luar negeri AS juga berdampak pada Indonesia, negara yang terkenal besar dan maju di dunia internasional. Indonesia menjaga netralitasnya dalam menghadapi intervensi AS, Rusia, dan Tiongkok serta memegang teguh pendirian dan prinsip strategis dalam politik luar negeri AS. Peran strategis Indonesia dalam kebijakan luar negeri AS tidak hanya dipengaruhi oleh netralitasnya tetapi juga oleh partisipasinya dalam berbagai forum multilateral. Selain itu, Indonesia akan memimpin G20 dan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023. Salah satu arah kebijakan utama yaitu meningkatkan perdagangan dan investasi antara AS dan Indonesia. Pemerintah Biden telah menunjukkan minatnya dalam memperkuat hubungan ekonomi dengan Indonesia, termasuk dengan membuka kembali Kantor Dagang AS di Jakarta dan mengadakan pertemuan antara pejabat tinggi kedua negara. Selain itu, pemerintah Biden juga telah mengumumkan rencana untuk memperkuat pasar ASEAN dan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Rencana ini meliputi

peningkatan dukungan untuk proyek infrastruktur dan peningkatan investasi AS di kawasan tersebut. Para penulis menyarankan pemerintah Indonesia untuk menjaga hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan mewaspadai perubahan kebijakan luar negeri Amerika setelah pemerintahan saat ini berkuasa. Pemerintah Indonesia dapat sekaligus menyelenggarakan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral dengan Amerika, yang dapat dilakukan pada masa kepemimpinan G20 tahun 2022 dan kepemimpinan ASEAN tahun 2023.

Namun, ada juga beberapa masalah yang dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi AS terhadap Indonesia di era Biden. Salah satunya adalah perlakuan Indonesia terhadap investor asing, termasuk investor AS. Beberapa perusahaan asing mengalami kesulitan dalam berinvestasi di Indonesia karena undang-undang yang rumit dan kurangnya kepastian hukum. Pemerintah Indonesia telah berjanji untuk memperbaiki situasi ini, namun masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Perdagangan yang ada saat ini senilai sekitar USD 30 miliar antara Indonesia dan Amerika Serikat berpotensi meningkat. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan perdagangan bilateral antara AS dan negara ASEAN lainnya. Amerika Serikat (AS) hampir tidak memasukkan Indonesia dalam agenda kebijakan luar negerinya ketika Donald Trump menjadi presiden. Namun, akibat perubahan kebijakan yang dilakukan Biden pasca kemenangannya dalam pemilihan presiden AS pada 20 Januari 2021, hubungan AS-Indonesia semakin membaik. Sebab, Biden merupakan wakil presiden pada masa pemerintahan Barack Obama. Sebelum Barack Obama. Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi AS terhadap Indonesia di era Biden masih dalam tahap awal, namun ada upaya yang jelas untuk memperkuat hubungan

ekonomi antara kedua negara dan meningkatkan investasi AS di kawasan Asia Tenggara.

Kebijakan ekonomi luar negeri AS di era Biden terhadap Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk hubungan historis antara kedua negara, kondisi ekonomi global, dan kebijakan-kebijakan perdagangan dan investasi yang diusung oleh pemerintah Biden. Salah satu latar belakang kebijakan ekonomi luar negeri AS di era Biden terhadap Indonesia adalah upaya untuk memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara. Indonesia adalah salah satu mitra dagang terpenting bagi AS di Asia Tenggara, dan kedua negara memiliki hubungan ekonomi yang kuat dalam berbagai sektor, termasuk energi, pertanian, manufaktur, dan teknologi.

Selain itu, kebijakan ekonomi luar negeri AS di era Biden juga dipengaruhi oleh perubahan dalam kebijakan perdagangan dan investasi yang diusung oleh pemerintah Biden. Pemerintahan Biden menekankan pentingnya membangun kembali ekonomi Amerika Serikat melalui kebijakan-kebijakan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, inovasi, dan investasi dalam sektor-sektor kunci. Dalam hal ini, Indonesia dapat menjadi mitra strategis bagi AS dalam hal memperkuat supply chain dan akses ke pasar regional. Selain itu, pemerintah Biden juga menekankan pentingnya mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh dunia. Hal ini mencakup dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan pengembangan sektor-sektor yang berpotensi memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang luas. Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan kebijakan-kebijakan ini dan memperkuat hubungan ekonomi dengan AS.

Namun, kebijakan ekonomi luar negeri AS di era Biden juga mungkin akan mempengaruhi beberapa isu yang menjadi perhatian bagi Indonesia, seperti kebijakan perdagangan dan investasi yang ketat. Penting bagi Indonesia untuk mengikuti perkembangan kebijakan Amerika Serikat dan menjaga hubungan bilateral yang baik dengan negara tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat juga telah meluncurkan kebijakan "America First" yang berfokus pada perlindungan industri domestiknya, yang dapat berdampak pada ekspor dari negara lain, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menjaga daya saing dan terus beradaptasi dengan perubahan kebijakan Amerika Serikat guna memperluas akses dan meningkatkan volume ekspor ke pasar AS, juga menjaga hubungan yang konstruktif dan saling menguntungkan dengan AS dan memperkuat posisinya sebagai mitra ekonomi yang penting di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan sejarah dan permasalahan yang telah dibahas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian bernama **“PENGARUH KEBIJAKAN AS TERHADAP NERACA PERDAGANGAN EKSPOR-IMPOR AMERIKA SERIKAT KE INDONESIA”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan setelah mengetahui permasalahan yang telah dibahas, maka penulis merumuskan topik kajian sebagai berikut :

“Bagaimana Implementasi Kebijakan Ekonomi AS di Era Biden Terhadap Ekspor-Import AS ke Indonesia?”

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk mempersempit permasalahan dan lebih berkonsentrasi pada ruang lingkup Kebijakan Ekonomi AS di Indonesia dengan kepemimpinan baru dan kebijakan baru yang berbeda dengan pemimpin masa lalu, penulis membatasi permasalahan berdasarkan tantangan yang telah dijelaskannya.

Pembatasan penelitian pada penelitian ini berfokus pada Pengaruh Kebijakan AS Terhadap Ekspor Indonesia Ke Amerika Serikat pada tahun 2020 sampai dengan 2022.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Memahami dampak kebijakan ekonomi AS pada masa Biden terhadap Indonesia: Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dan mengevaluasi bagaimana kebijakan ekonomi AS dan neraca perdagangan ekspor-impor yang diterapkan pada masa Biden berdampak pada Indonesia. Hal ini akan memberikan wawasan lebih lanjut mengenai bagaimana perekonomian kedua negara berinteraksi.

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami dampak perubahan kebijakan ekonomi AS di era Biden terhadap Indonesia. Beberapa tujuan spesifik yang dapat dicapai melalui penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis kebijakan ekonomi AS di era Biden yang berdampak langsung terhadap Indonesia: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami kebijakan ekonomi AS yang diimplementasikan oleh pemerintahan Biden yang memiliki dampak langsung terhadap Indonesia. Hal ini meliputi kebijakan perdagangan, investasi dan lainnya.
- b. Menilai respons dan adaptasi pemerintah Indonesia terhadap kebijakan ekonomi AS: Penelitian ini akan menganalisis sikap dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai respons terhadap kebijakan ekonomi AS di era Biden. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah Indonesia mampu menyesuaikan kebijakan dan strategi ekonomi nasional dengan kebijakan AS, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi dampaknya.
- c. Mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi AS terhadap sektor perekonomian Indonesia: Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak kebijakan ekonomi AS terhadap berbagai sektor perekonomian pada masa pemerintahan Biden. Hal ini terdiri dari: 1) Transfer produk dan jasa antar negara. 2) Perpindahan uang dari luar negeri ke dalam negeri melalui penanaman modal asing. 3) Pemindahan pekerja lintas negara. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana kebijakan AS mempengaruhi

pertumbuhan, investasi, lapangan kerja, dan kompetitivitas sektor-sektor tersebut di Indonesia.

- d. Mengidentifikasi peluang kerja sama ekonomi antara AS dan Indonesia: Penelitian ini akan mengevaluasi apakah adanya perubahan kebijakan ekonomi AS di era Biden membuka peluang baru bagi kerja sama ekonomi antara AS dan Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang menjanjikan, seperti perdagangan, investasi, teknologi, dan transfer pengetahuan, yang dapat dipromosikan melalui kolaborasi bilateral.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

- a. Memahami Hubungan Ekonomi Bilateral: Penelitian ini akan membantu memahami hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam konteks perdagangan. Dengan menganalisis pengaruh kebijakan AS terhadap ekspor Indonesia, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang dinamika ekonomi bilateral, tantangan, dan peluang yang mungkin dihadapi oleh ekspor Indonesia ke pasar AS.
- b. Menilai Dampak Kebijakan AS: Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi dan menilai dampak kebijakan perdagangan Amerika Serikat terhadap ekspor Indonesia. Studi ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan AS dapat mempengaruhi ekspor Indonesia, baik secara positif maupun negatif, melalui perubahan tarif, peraturan, dan perjanjian perdagangan.
- c. Membantu Perencanaan Strategis: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk perencanaan strategis dalam upaya meningkatkan ekspor

Indonesia ke Amerika Serikat. Dengan memahami pengaruh kebijakan AS, pemerintah, pelaku bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan peluang pasar, mengatasi hambatan perdagangan, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di Amerika Serikat.

- d. Rekomendasi Kebijakan: Penelitian ini dapat memberikan dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan pengambil keputusan terkait dengan perdagangan bilateral. Studi ini dapat membantu dalam mendukung kebijakan yang lebih mendukung ekspor Indonesia, menurunkan hambatan perdagangan, dan mendorong akses pasar dengan menunjukkan dampak kebijakan AS.
- e. Kontribusi pada Literatur Akademik: Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada literatur akademik dengan menyediakan data, analisis, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti dan akademisi dalam mengembangkan studi lebih lanjut tentang perdagangan internasional dan pengaruh kebijakan terhadap ekspor. Kegunaan teoritis, mengembangkan keilmuan HI dan kebijakan luar negeri di bidang ekonomi politik
- f. Digunakan dalam kehidupan nyata sebagai syarat lulus mata kuliah skripsi pada program studi sains internasional. Perguruan Tinggi Pasundan.